

**ANALISIS PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PADA
SEKERTARIAT DINAS PENDIDIKAN PROV. JAWA BARAT
TAHUN 2018-2020**

Marina Nur Asri Wirataruna
Universitas Widyatama Bandung

ABSTRAK

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan selama satu periode kedepan yang tertuang secara kuantitatif. Pada tahun 2020, Indonesia sedang mengalami masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, perekonomian Indonesia turun sebesar 2.07 persen. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kondisi anggaran diberbagai sektor, seperti pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu institusi yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan dengan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi anggaran, realisasi, hambatan, dan solusi pada anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, terdapat perubahan nominal anggaran dan realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rentan tahun 2018-2020 akibat terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Gagasan dalam penelitian ini adalah tetap menekan anggaran diberbagai kategori, seperti poliklinik dan peralatan untuk memfokuskan anggaran dan realisasi untuk pemenuhan protokol kesehatan Covid- 19 guna menciptakan kondisi yang lebih baik.

Kata Kunci: Anggaran, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Realisasi .

ABSTRACT

The budget is a plan of activities that will be carried out by a company during the next period which is stated quantitatively. In 2020, Indonesia is experiencing a period of the Covid-19 pandemic which causes an economic crisis. According to the Indonesian Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy fell by 2.07 percent. This condition certainly has an impact on budget conditions in various sectors, such as education. The West Java Provincial Education Office is one of the institutions affected by the Covid-19 pandemic. The method used in this research is a comparative analysis with data obtained from the West Java Provincial Education Office. The aim is to find out budget conditions, realizations, obstacles, and solutions to the West Java Provincial Education Office budget. As a result, there was a change in the nominal budget and the realization of the West Java Provincial Education Office in the vulnerable 2018-2020 due to the economic crisis due to the Covid-19 pandemic. The idea in this research is to keep pressing the budget in various categories, such as polyclinics and equipment to focus the budget and realization for the fulfillment of the Covid-19 health protocol in order to create better conditions.

Keywords: Budget, Provincial Education Office West Java, Realization.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan sumber daya manusia disuatu negara. Fugsi dan tujuan Pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan di harapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan seperti yang disebutkan di atas. Dibentuk bersamaan dengan digulirkannya era otonomi daerah sebagai respons terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik.

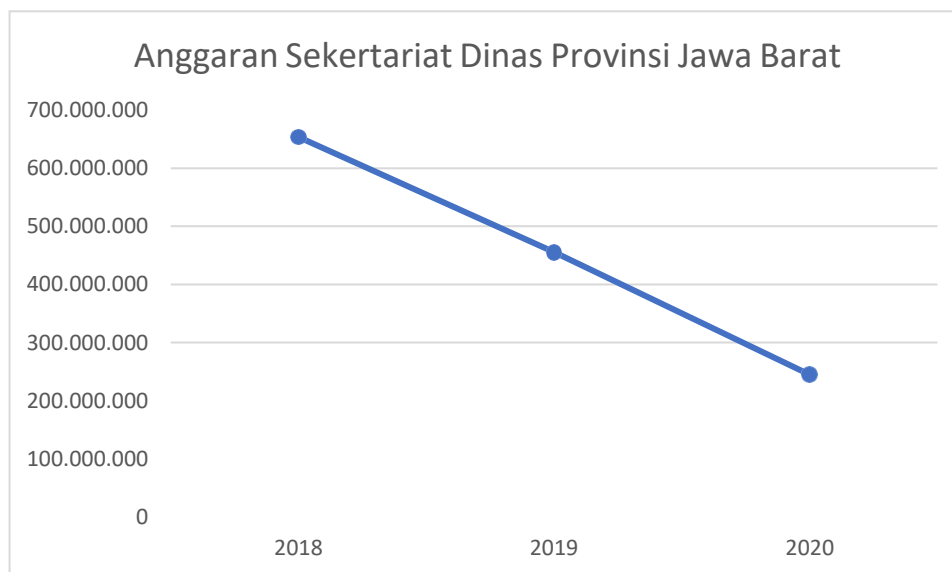
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 60, 61 dan 62 maka Pemerintahan Provinsi Jawa Barat membentuk perangkatan yang oleh Kepala Dinas Pendidikan, diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Peraturan gubernur jawa barat nomor 59 tahun 2017 tentang Tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja dinas pendidikan pemerintah daerah provinsi jawa barat Pasal 4 Peraturan Sekretariat merupakan divisi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Pada tahun 2020, dunia mengalami masa pandemi Covid-19 yang sempat menyebabkan krisis ekonomi dunia. Beberapa nilai ekonomi di berbagai dunia turun cukup tinggi akibat terbatasnya aktivitas ekonomi untuk memutus rantai pandemi Covid-19. Sektor pendidikan, merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Perubahan sistemasi pembelajaran menjadi daring tentunya juga mempengaruhi anggaran dan realisasi, khususnya di Dinas Pendidikan yang menjadi instansi utama di sektor pendidikan Indonesia. Dengan kondisi tersebut, tentunya dinas pendidikan termasuk divisi kesekretariatan perlu mengimplementasikan penyusunan anggaran yang tepat sasaran agar tetap bertahan dan berkembang di tengah kondisi krisis.

Anggaran sendiri merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian dalam sebuah organisasi ataupun instansi yang memiliki peran penting untuk menghindari defisit alur kas keuangan (Rustiyani, 2007). Perencanaan dan pengendalian keuangan penting untuk dilakukan untuk menciptakan suatu aliran keuangan yang sehat dengan tujuan membantu menciptakan suatu kebijakan secara efisien bagi

suatu organisasi dan instansi. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan perlu ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas pemerintah dengan beberapa tahapan, seperti tahap persiapan, penyusunan anggaran, ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia tentunya perlu mengatur anggaran untuk bidang pendidikannya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan utama agar dapat merencanakan pemakaian dana yang terkendali, efektif dan efisien, juga untuk memastikan aliran keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya pada divisi kesekretariatan tetap dalam keadaan yang sehat. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 tentunya perlu adanya analisis terkait pada kondisi ketika sebelum dan setelah terjadinya pandemi Covid-19 agar dapat melihat apakah kondisi tersebut mempengaruhi realisasi anggaran atau tidak. Melihat Anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat semakin mengalami penurunan, hal itu dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 1.1 Anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Periode 2018-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diolah

Dari grafik 1.1 dapat diperoleh informasi bahwa anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selalu menurun tiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Seharusnya dengan upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dapat meningkatkan target pencapaian dalam setiap tahunnya, namun

pada kenyataannya target pencapaian yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Prov. Jawa barat terus mengalami penurunan. Banyak faktor yang mempengaruhi terus menurunnya target pencapaian tersebut yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu terjadinya pandemi Covid-19.

Jika melihat Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat semakin mengalami penurunan, hal itu dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 1.2 Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diolah

Dari grafik 1.2 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi penggunaan dana mengalami penurunan secara terus menerus, realisasi penggunaan dana pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat mencapai 653,748,635 ribu rupiah, sedangkan pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Prov. Jawa barat mengalami penurunan dengan nominal 455,468,020 ribu rupiah dan mengalami penurunan kembali ditahun 2020 dengan nominal 244,884,900 ribu rupiah.

Realisasi penggunaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat selalu berada di bawah target pencapaian yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Perbandingan
2018	790,110,245	653,748,635	83%
2019	537,708,270	455,468,020	85%
2020	396,119,250	244,884,900	62%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diolah

Dari tabel 1.1 dapat diperoleh informasi bahwa perbandingan antara target dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggunakan anggaran yang tersedia sebesar 83%, lalu meningkat sebesar 85% pada tahun 2019, dan kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2020 dengan perbandingan sebesar 62% yang salah satunya didasari kondisi krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun 2019 mengalami kenaikan persentase, namun pada 2020 turun kembali yang menandakan turunnya pula efektivitas penggunaan dana bila dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan sebelumnya.

Pengendalian anggaran dinas pendidikan sangat penting dan perlu menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Menurut Heckman (2008), dengan memprioritaskan pendidikan tentunya akan menghasilkan timbal balik keuntungan yang besar di masa yang akan datang.

Dengan penjelasan tersebut, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sangat menarik dibahas untuk mengetahui bagaimana kondisi anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat mengalami kenaikan maupun penurunan, dan bagaimana cara mengatasi persentase efektivitas tersebut agar dapat naik secara berkesinambungan. Penulis menganalisis mengenai informasi tersebut dengan bantuan data dari Dinas Pendidikan pada tahun 2018 hingga 2020 untuk melihat bagaimana perbandingan anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penulis memilih judul Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi pada Sekertariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2018-2020.

KERANGKA TEORITIS

Manajemen

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2017:9) mengemukakan bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Manajemen Keuangan

Menurut Sujarweni (2017:9) Manajemen Keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha- usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

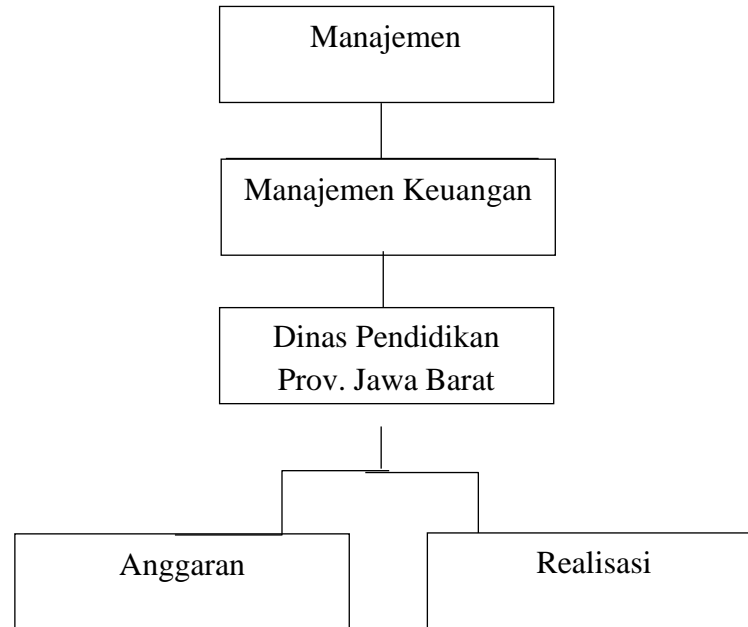
Laporan Keuangan

Menurut Fahmi, (2017:2) “laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan”.

Laporan Realisasi Anggaran

Siregar (2015: 82) Mengemukakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang isinya memaparkan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam satu tahun.

Paradigma Penelitian dan Hipotesis



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur berbagai sumber daya manusia dan sumber daya lainya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik, diorganisasikan, digerakan, dan diawasi sehingga penggunaanya tepat sebagaimana rencana yang ditetapkan.

Dalam manajemen terdapat manajemen keuangan, yaitu suatu aktivitas kegiatan dengan usaha-usaha untuk mempelajari penggunaan dan pencarian dana serta pembagian hasil operasi usaha secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu lembaga/instansi yang mempraktikan Manajemen keuangan adalah Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat.

Sebagaimana teori yang telah di paparkan sebelumnya bahwa dalam laporan keuangan terdapat anggaran dan realisasi yang harus di sesuaikan dengan target. Seperti dinas pendidikan yang kali ini akan dijadikan sebagai salah satu contoh instansi/lembaga untuk mempraktikan teori anggaran dan realisasi dalam manajemen keuangan.

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Tidak hanya berupa anggaran, diakhir periode memuat rincian realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini penulis mendapatkan sumber data dari pihak Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat secara langsung dengan meminta data tentang Mutasi Persediaan Sekertariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat pada periode 201 -2020. Selain menggunakan data tersebut, penulis juga memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Anggaran Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat

Anggaran Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai dalam pasal 31 ayat (4) yang bertujuan untuk membiayai pendidikan. Dalam pelaksanaan proses pendidikan di provinsi Jawa Barat, tentunya Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat perlu membantu menyalurkan anggarannya pada seluruh sekolah negeri yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat. Kondisi Anggaran Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Anggaran Dinas Pendidikan Prov.Jawa Barat

Tahun	Anggaran
2018	790.110.245
2019	537.708.270
2020	396.119.250

Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Jawa Barat (Data diolah Penulis)

Dari tabel 4.1 dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 Anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat mencapai Rp.790.110.245,-. Namun, pada tahun tahun 2019 Anggaran Sekretariat mengalami penurunan dengan nominal Rp.537.708.270,-. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali secara signifikan, dimana anggaran yang diharapkan tidak mengalami kenaikan sama sekali yaitu dengan nominal Rp.396.119.250,-. Dengan demikian, Anggaran Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat pada tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan hampir 50% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2 Tabel Anggaran

	Anggaran		
	2018	2019	2020
ATK	139.157.270	274.994.770	199.426.750
Poliklinik	126.174.470	0	0
Peralatan	394.098.750	0	0
CTK	130.679.755	262.713.500	196.692.500

Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Jawa Barat (Data diolah Penulis)

Jika melihat Anggaran dalam kategori ATK pada tahun 2018 mencapai Rp.139.157.270,- dan mengalami kenaikan pada tahun 2019, dengan nominal Rp.274.994.770,-. Kemudian, menurun kembali pada tahun 2020 dengan nominal Rp.199.426.750,-. Penurunan anggaran yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya ekonomi Indonesia sehingga berdampak pada Anggaran ATK Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat.

Pada kategori poliklinik dan peralatan, anggaran hanya terjadi pada tahun 2018, yakni sebesar Rp.126.174.470,-. Anggaran poliklinik tidak tersedia pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan, Cetakan (CTK) pada tahun 2018 memiliki anggaran sebesar Rp.130.679.755,-. Kemudian, meningkat menjadi Rp.262.713.500,- pada tahun 2019 dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi Rp.196.692.500,-.

Berdasarkan anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat tahun 2018 - 2020 dengan metode perbandingan dapat diketahui bahwa anggaran ATK, Poliklinik, Peralatan, dan CTK mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan pada tahun 2018. Namun, anggaran Sekretariat Pendidikan Prov. Jawa Barat mengalami penurunan ditahun berikutnya, yaitu tahun 2020 jika dibandingkan dengan anggaran sekretariat pada tahun 2019.

Kondisi Realisasi

Tabel 3. Realisasi

Tahun	Realisasi
2018	653.748.635
2019	455.468.020
2020	244.884.900

Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Jawa Barat (Data diolah Penulis)

Dari tabel 4.1 dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 realisasi anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat pada tahun mencapai Rp.653.748.635,-. Namun, pada tahun tahun 2019 Realisasi mengalami penurunan dengan nominal Rp.455.468.020,-. Kemudian, pada tahun berikutnya juga mengalami penurunan secara signifikan, dimana realisasi yang diharapkan tidak mengalami kenaikan sama sekali yaitu dengan nominal Rp.244.884.900,-. Pada tahun 2018 – 2020 Realisasi Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat terus mengalami penurunan yang hampir setiap tahunnya penurunan tersebut hampir 25% dari tahun sebelumnya.

Jika melihat secara klasifikasi realisasi Anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Bara pada Tabel 4.2.2. Dapat diketahui bahwa dalam kategori ATK pada tahun 2018 mencapai Rp.112.381.390,- dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan nominal Rp.227.467.020,-. Kemudian, ditahun 2020 mengalami penurunan dengan nominal Rp.119.849.900,-. Sedangkan, poliklinik dan peralatan realisasi hanya terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 55.187.740 untuk poliklinik dan sebesar 394.098.750 untuk peralatan. Kemudian, dalam kategori CTK pada tahun 2018 mencapai Rp.92.080.755,- dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan nominal Rp.228.001.000,-. Kemudian ditahun 2020 mengalami penrunan dengan nominal Rp.125.035.000,-.

Tabel 4. Realisasi

Realisasi			
	2018	2019	2020
ATK	112.381.390	227.467.020	119.849.900
Poliklinik	55.187.740	0	0
Peralatan	394.098.750	0	0
CTK	92.080.755	228.001.000	125.035.000

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat (Data diolah Penulis)

Berdasarkan realisasi anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat tahun 2018 - 2020 dengan metode perbandingan dapat diketahui bahwa anggaran ATK dan CTK mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan pada tahun 2018. Akan tetapi, anggaran ATK dan CTK mengalami penurunan pada tahun 2020. Sedangkan, poliklinik dan peralatan tidak ada anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Namun, secara umum realisasi anggaran Sekretariat Pendidikan Prov. Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat menurunnya nominal anggaran di Sekretariat Prov. Jawa Barat.

Hambatan dalam Realisasi dana Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat

Tabel 5

Tahun	Target	Realisasi	Perbandingan
2018	790.110.245	653.748.635	83%
2019	537.708.270	455.468.020	85%
2020	396.119.250	244.884.900	62%

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat (Data diolah Penulis)

Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi yaitu:

- a. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tertunda akibat pandemi Covid 19 yang berdampak pada penurunan nominal anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat adalah Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tertunda.
- b. Adanya penurunan nominal anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat. Hambatan tersebut terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis ekonomi bagi Indonesia sehingga menyebabkan menurunnya nominal anggaran bagi Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat, Selain itu terjadinya kekosongan anggaran pada sektor poliklinik dan peralatan, dikarenakan dinas pendidikan prov. Jawa barat lebih memfokuskan alokasi anggaran belanja pada sektor perlengkapan kesehatan guna untuk meningkatkan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid 19.

Solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat dalam Menghadapi Hambatan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat dalam menghadapi hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Sampai saat ini solusinya tetap menunggu pandemi Covid-19 untuk segera berakhir dan tetap meningkatkan kegiatan yang mempengaruhi terkait dengan penyerapan anggaran.
- b. Menekan anggaran dalam sektor poliklinik dan peralatan dengan tetap memaksimalkan protokol kesehatan Covid-19 agar sektor lainnya dapat dimaksimalkan kembali dengan anggaran yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan mengenai Perbandingan Anggaran dan Realisasi di Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis bahwa pada kondisi anggaran sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2018 – 2020 sedang mengalami penurunan.
2. Kondisi realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2018 – 2020 mengalami penurunan akibat nominal anggaran sekretariat yang semakin menurun di masa pandemi.
3. Hambatan yang terjadi dalam anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menurunnya nominal anggaran sehingga ada penekanan dan penundaan anggaran pada kategori poliklinik dan peralatan.
4. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan tetap menekan anggaran diberbagai kategori, seperti poliklinik dan peralatan untuk memfokuskan pada pemenuhan protokol kesehatan Covid-19 agar kondisi dapat berjalan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. (2016). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
- Amirullah. (2015). Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2011). PSAK No. 45 (revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta: IAI
- Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, 2017. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. (Mathis, Robert, dan H. Jacson.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyawan, S. (2015). Manajemen Keuangan. Bandung: CV Setia Pustaka.
- Musthafa. (2017). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Nafarin, M., (2015)., Penganggaran Perusahaan. Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat
- Prastowo, Dwi. (2015). Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Sasongko dan Parulian., (2015)., Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela. (2016), Manajemen Sumber Daya Manusia “Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja”. Jakarta: Bumi Aksara
- Siregar. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Chaled, Saddam: Sarumpet, Susi. (2019). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.45 Pada Organisasi Nirlaba Di Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6-7.

Website :

- Indonesia, I. A. (2015). PSAK No 1 Tentang Laporan Keuangan- edisi revisi. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT Raja Grafindo.
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kera Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174400/pegub-prov-jawa-barat-no-59-tahun-2017>
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126378/permendagri-no-17-tahun-2007>
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41063/perpres-no-54-tahun-2010>
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45337/uu-no-25-tahun-1999>